

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH

Nurul Khanifah
NPP. 30.0709

Asdaf Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah
Program Studi Kebijakan Publik
Email: nurulkhanifah94@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Drs. Herry Soesanto, M.Si

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The waste problem is an important and complex problem in Indonesia. The increase in the volume of waste resulted from the increase in population. To overcome the waste problems that occur, a policy is needed regarding waste management in Tegal Regency. **Purpose:** This research aims to know determine and analyze the implementation of waste management policies in Tegal Regency and to find out the driving and inhibiting factors as well as to find out the efforts that can be made to optimize the implementation of waste management policies in Tegal Regency. **Method:** This study uses a qualitative descriptive research method. The technique of collecting data are done by interviews (14 informant) and documentation. **Result:** The findings are youth participation in planning is adequate, implementation and utilization of results are quite good, although it is still constrained by the preoccupation of youth and the low level of awareness of some youth. **Conclusion:** Youth participation the Lorong Literasi Gowa Programs in Paccinongang Sub District has been going well because of the synergy of the local government and its youth community. In order to increase youth participation, it is recommended to optimize information technology, social media and collaborate with various components including entrepreneurs.

Keywords: Policy Implementation; Waste Management; Public Participation

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Permasalahan sampah merupakan masalah yang penting dan kompleks di Indonesia. Peningkatan volume sampah ditimbulkan dari meningkatnya jumlah penduduk. Untuk mengatasi permasalahan sampah yang terjadi maka dikerluakan kebijakan tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Tegal. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Tegal dan

mengetahui faktor pendorong dan penghambat serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Tegal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (14 informan), dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh pada penelitian ini yaitu Pemerintah Kabupaten Tegal dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal telah menerapkan kebijakan pengelolaan sampah namun masih belum optimal dilihat dari teori implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier. **Kesimpulan:** Penerapan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Tegal belum berjalan dengan optimal. Masih ditemukan beberapa kendala pada dimensi variabel non-hukum yang mempengaruhi implementasi terutama pada indikator dukungan publik.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan; Pengelolaan Sampah; Partisipasi Masyarakat

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Meningkatnya jumlah sampah menyebabkan permasalahan sampah semakin kompleks. Berdasarkan informasi yang dirilis pada April 2020 oleh *Indonesia National Plastic Action Partnership*, sebanyak 67,2 juta ton sampah setiap tahunnya dan sekitar 9% atau 620.000 ton sampah masuk ke sungai, danau dan laut. Diperkirakan 85.000 ton sampah dihasilkan per hari, dan jumlah tersebut diperkirakan meningkat menjadi 150.000 ton per hari di Indonesia pada tahun 2025. Jumlah tersebut didominasi oleh sampah yang berasal dari rumah tangga dengan kisaran antara 60 persen hingga 75 persen.

Permasalahan sampah masih banyak terjadi di Kabupaten Tegal, dimana Kabupaten Tegal berada pada urutan keenam dari 33 kabupaten atau kota yang berada di provinsi Jawa Tengah. Peningkatan volume sampah yang terjadi di Kabupaten Tegal mendekati angka 700 ton perhari dan sekitar 252 ribu ton pertahun. Permasalahan sampah di Kabupaten Tegal salah satu penyebabnya yaitu sarana prasarana tempat pembuangan akhir (TPA) yang belum memadai. Saat ini hanya ada satu tempat pembuangan akhir (TPA) seluas 4,1 hektar di Kabupaten Tegal yang terletak di Desa Penujah Kecamatan Kedungbanteng. Keterbatasan area tempat pembuangan akhir (TPA) membuat sampah semakin menumpuk setiap harinya¹. Pada tahun 2021 volume sampah di TPA Penujah sebesar 222.745 m³ mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 sebesar 205.111 m³ dan tahun 2019 sebesar 147.604 m³.

¹

Banyaknya jumlah penduduk di Kabupaten Tegal tidak berbanding lurus dengan sarana prasarana yang disediakan saat ini. Tempat pembuangan akhir (TPA) yang hanya ada satu dan hanya didukung dengan satu unit eskavator dan dua unit bulldoser. Akan tetapi, alat tersebut sering mengalami gangguan dan kerusakan yang mengakibatkan sampah yang diangkut dari tempat pembuangan sementara (TPS) dengan menggunakan truk tidak dapat dibongkar di dermaga tempat pembuangan akhir (TPA) dan menyebabkan memanjangnya antrian truk sampai di luar tempat pembuangan akhir (TPA). Pengelolaan sampah dari hulu ke hilir yang belum diterapkan secara maksimal pada masyarakat juga menjadi salah satu faktor penyebab permasalahan sampah masih terjadi.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tentang permasalahan sampah di Kabupaten Tegal. Peningkatan jumlah penduduk yang diikuti dengan meningkatnya volume sampah menjadi faktor penyebab permasalahan sampah di Kabupaten Tegal. Berdasarkan dengan data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal terdapat sebanyak 205.111 m³ pada tahun 2020, sebanyak 222.745 m³ tahun 2021, dan sebanyak 188.494 m³ tahun 2022. Data ini menunjukkan bahwa volume sampah yang dihasilkan masih tergolong banyak walaupun mengalami penurunan pada setahun terakhir.

Keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia untuk pengelolaan sampah menjadi permasalahan berikutnya. Beberapa alat berat seperti eskavator dan bulldoser yang mengalami gangguan dan kerusakan serta truk-truk pengangkut sampah yang jumlahnya terbatas dan tidak sebanding dengan luas wilayah serta jumlah penduduk di Kabupaten Tegal. Kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia menyebabkan terhambatnya pengangkutan sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA) sehingga menyebabkan memanjangnya antrian truk sampai di luar tempat pembuangan akhir.

Rendahnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengatasi permasalahan sampah sehingga masih sedikit masyarakat yang sadar akan pengelolaan sampah di terutama pada pengelolaan sampah secara terpadu dari hulu ke hilir. Pengelolaan sampah hulu ke hilir dimulai dengan pemilahan berbagai sampah organik dan anorganik tingkat rumah tangga yang kemudian dapat berakhir ke bank sampah dan sampah organik yang telah dipisahkan dapat diolah menjadi pupuk atau dikembangkan menjadi budidaya maggot. Akan tetapi dalam realisasinya masih banyak masyarakat yang menggunakan sistem pengelolaan sampah yang lama, yaitu sistem pengelolaan sampah kumpul, angkut, dan buang. Sehingga sistem pengelolaan sampah dari hulu ke hilir belum terlaksana dengan baik.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai referensi pada penelitian ini dengan kesamaan topik mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Penelitian Novia Kencana berjudul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Ogan Komering Ulu (Kencana N, 2017) menemukan bahwa pengelolaan sampah sudah cukup berjalan dengan baik namun belum optimal dikarenakan masih ada beberapa hambatan yaitu partisipasi masyarakat yang

kurang, perlengkapan sarana dan prasarana yang belum memadai, dan terbatasnya anggaran/dana. Penelitian Yulianto Mokodompis, Markus Kaunang, Ventje Kasenda berjudul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Manado (Yulianto Mokodompis dkk, 2019) menemukan bahwa pengelolaan sampah di kota Manado sudah berjalan dengan baik, akan tetapi Masih mengalami kendala yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dan keadaan sarana dan prasarana yang kurang memadai. Penelitian Bella Dwi Hastuti, Faizal Anwar, Titi Darmi berjudul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bengkulu Selatan (Bella Dwi Hastuti dkk, 2021) menemukan bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah sudah berjalan sesuai standar dan prosedur yang telah ditetapkan namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya terealisasi sesuai dengan isi kebijakan dikarenakan adanya beberapa hambatan yaitu kurangnya anggaran, kurangnya SDM yang ahli di bidang persampahan, masih ada aparat yang melakukan tupoksi di luar peraturan yang ada, dan masih ada pelaksana yang menjalankan tupoksi di luar SOP.

Penelitian Tri Yudianto, Prabang Setyono, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani berjudul Implementasi Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Blora (Tri Yudianto dkk, 2020) menemukan bahwa implementasi tersebut dapat berjalan dengan baik yang berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2011 meliputi retribusi, sumber timbulan sampah, pewadahan, pengumpulan (TPS), pengangkutan dan tempat pemrosesan akhir (TPS) dengan Indeks kepuasan pelanggan mencapai angka 86,858 yang artinya memuaskan. Berdasarkan penelitian Gusrini Yulistia, Margaretha Suryaningsih, Dewi Rostyaningsih berjudul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Kota Semarang Menurut Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Gusrini Yulistia dkk, 2015) menemukan bahwa proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal tersebut terlihat dari kegiatan pengurangan sampah yang meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah dengan metode 3R dan bank sampah yang dilakukan oleh pemerintah belum sepenuhnya berjalan dengan optimal karena kurangnya keikutsertaan dan kurang pedulinya masyarakat terhadap jumlah timbulan sampah.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu yaitu peneliti melakukan penelitian mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Tegal. Penelitian ini menggunakan teori implementasi Mazmanian dan Sabatier berbeda dengan penelitian sebelumnya menggunakan teori implementasi George Edward III.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Tegal, untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Tegal, Untuk mengetahui upaya yang dapat

dilakukan dalam mengoptimalkan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Tegal.

II. METODE

Penulis menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Mazmanian dan Sabatier (1983) yang terdiri dari 3 (tiga) dimensi yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu: (1) identifikasi masalah, (2) kemampuan statuta untuk menyusun implementasi, dan (3) variabel non-hukum yang mempengaruhi implementasi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif melalui pendekatan *Ethnography* bahwa peneliti menggunakan observasi wawancara untuk mempelajari kebiasaan dan budaya suatu kelompok dalam kondisi alami. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder dengan tahapan analisis data menurut Miles dan Huberman (Bungin 2003) yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 14 orang informan yang terdiri dari asisten daerah II sekretariat daerah Kabupaten Tegal, kepala dinas lingkungan hidup, kabid PLSB3, kasi penanganan sampah, sekretaris camat, kepala desa, masyarakat, dan KSM bank sampah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis penelitian tentang implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Tegal dengan menggunakan teori implementasi menurut A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983) yang terdiri dari 3 (tiga) dimensi yaitu identifikasi masalah, kemampuan statuta untuk menyusun implementasi, variabel non-hukum yang mempengaruhi implementasi. Adapun hasil pembahasan dari penelitian dapat dilihat sebagai berikut:

3.1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan tahapan untuk melihat dan menentukan permasalahan yang terjadi dan termasuk dalam permasalahan apa serta bagaimana penyelesaiannya. Dalam identifikasi masalah terdapat beberapa indikator yaitu:

3.1.1. Tersedianya Teori dan Teknologi Teknis Yang Valid

Persoalan sampah di Kabupaten Tegal termasuk ke dalam permasalahan lingkungan yang sukar untuk diselesaikan. Dikarenakan dalam mengatasi permasalahan tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikannya. Pemahaman masyarakat diperlukan mengenai permasalahan sampah bahwa permasalahan sampah bukan hanya menjadi

tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup akan tetapi menjadi tanggung jawab seluruh warga masyarakat Kabupaten Tegal.

3.1.2. Keragaman Perilaku Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran pada kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Tegal yaitu masyarakat Kabupaten Tegal sendiri. Banyaknya jumlah penduduk di Kabupaten Tegal memunculkan perilaku masyarakat yang beragam dalam mengatasi pengelolaan sampah di lingkungan sekitar. Kesadaran dan kepedulian masyarakat tergolong masih kurang dan *mindset* dari masyarakat yang masih menerapkan sistem kumpul, angkut, dan buang. Diperlukan membangun kerjasama baik antara semua pihak untuk membangun perilaku masyarakat yang sadar dalam pengelolaan sampah.

3.1.3. Prosentase Kelompok Sasaran Terhadap Jumlah Populasi

Kesadaran masyarakat mengenai permasalahan sampah dan pengelolaan sampah perlu ditumbuhkan dan disebarluaskan lagi ke daerah-daerah lain yang jauh dari Ibu Kota Kabupaten Tegal. Saat ini jumlah masyarakat yang sadar akan pengelolaan sampah sudah mengalami peningkatan kira-kira menjadi 30% dibandingkan pada tahun 2020. Prosentase tersebut sangat berpengaruh pada penurunan jumlah sampah yang dibuang ke TPA. Harapannya hal tersebut dapat meningkat setiap tahunnya dan bisa mencapai target sekitar 70-80% pada tahun 2025.

3.2. Kemampuan Statuta Untuk Menyusun Implementasi

Implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh kemampuan dari statuta (aturan) yang berlaku. Apabila suatu kebijakan memiliki kekuatan di masyarakat, maka dalam implementasinya akan mudah diterima masyarakat, dan sebaliknya apabila suatu kebijakan memiliki kekuatan yang lemah maka dalam implementasinya sulit untuk diterima masyarakat. kemampuan statuta untuk menyusun implementasi dapat dilihat dari beberapa sub dimensi yang meliputi:

3.2.1. Penggabungan Teori Kausal Yang Memadai

Penggabungan teori-teori kausal diperlukan untuk memantapkan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Pelaksanaan program-program pengelolaan sampah dibutuhkan pemahaman dan pengetahuan mengenai teori-teori tentang pengelolaan sampah. Dinas Lingkungan Hidup membentuk beberapa komunitas-komunitas pengelolaan sampah di masyarakat yang dibekali pengetahuan dan pemahaman mengenai pengelolaan sampah dan program-program pengelolaan sampah di Kabupaten Tegal dengan melalui pembinaan langsung dari Dinas Lingkungan Hidup yang meliputi:

- a. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Bank Sampah
- b. Asosiasi Bank Sampah Indonesia Cabang Kabupaten Tegal (ASOBSI)
- c. Institut Sampah Indonesia (INSI)
- d. Yayasan Rukun

Dari komunitas-komunitas tersebut diharapkan dapat membantu Pemerintah Kabupaten Tegal dan Dinas Lingkungan Hidup untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan pengelolaan sampah secara langsung kepada masyarakat yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

3.2.2. Kejelasan Arah Kebijakan

Kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Tegal memiliki arah yang jelas yaitu untuk pengurangan sampah dan penanganan sampah yang sistematis dan berkesinambungan, dan memiliki sasaran yang jelas yaitu seluruh masyarakat. Tujuan dari pengelolaan tersebut seperti pada Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah yaitu peningkatan kesehatan masyarakat, peningkatan kualitas lingkungan, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat, menjadikan sampah sebagai sumber daya, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa arah dan tujuan kebijakan pengelolaan sampah sudah jelas tertera pada isi Perda tentang pengelolaan sampah tersebut. Akan tetapi dalam implementasi di masyarakat masih belum terlaksana sepenuhnya, hal tersebut disimpulkan berdasarkan wawancara pada masyarakat bahwa masih ada beberapa masyarakat yang belum mengetahui isi dari perda tersebut.

3.2.3. Sumber Keuangan

Implementasi suatu kebijakan dibutuhkan dukungan dari beberapa aspek, salah aspeknya yaitu sumber keuangan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut. Sumber keuangan dalam kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Tegal sebagian berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah senilai RP 12.210.817.000. Selain dari APBD, anggaran dalam pengelolaan sampah saat ini berasal dari beberapa sumber lain. Anggaran lainnya berasal anggaran pusat, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan ada juga retribusi atau iuran dari masyarakat sesuai dengan ketentuan di masing-masing wilayah. Dana yang digunakan untuk persoalan sampah masih belum tercukupi. Permintaan penambahan anggaran sudah dilakukan, akan tetapi belum terealisasi dikarenakan harus terbagi-bagi dengan program-program prioritas daerah yang lainnya.

3.2.4. Keterpaduan Hierarki Dalam dan Diantara Lembaga Pelaksana

Implementasi suatu kebijakan bukan hanya dilakukan oleh satu pihak saja, akan tetapi memiliki keterkaitan dan kerja sama dari berbagai pihak untuk membantu keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Dalam pelaksanaan kerja sama implementasi kebijakan pengelolaan sampah, dibutuhkan kerja sama dari lembaga pelaksana yaitu pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa dengan pelaksana program yaitu masyarakat Kabupaten Tegal. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada beberapa sumber, dapat ditarik kesimpulan bahwa koordinasi dan kerja sama antara lembaga pelaksana sangat dibutuhkan untuk kemudahan menerima informasi. Tentunya koordinasi dilakukan secara hierarki antara lembaga pelaksana kebijakan.

3.2.5. Rekrutmen Pejabat Pelaksana

Pelaksanaan urusan pemerintahan terutama terkait urusan lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dibutuhkan pegawai untuk melaksanakan urusan tersebut. Rekrutmen yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari dua jalur yaitu jalur ASN dan jalur THL (Tenaga Harian Lepas).

Tabel 1.
Data Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah
1	Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Lingkungan Hidup	73
2	THL Bidang Umum dan Kepegawaian	15
3	THL Bidang Perencanaan	4
4	THL Bidang Keuangan	4
5	THL Bidang Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan	3
6	THL Bidang Penataan Lingkungan (THL Lama)	3
7	THL UPTD LAB	7
8	THL UPTD PASL	14
9	THL Bidang PSLB3	222
10	THL Bidang Penataan Lingkungan (THL Baru)	73
Jumlah		418

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal, 2022

3.2.6. Akses Formal Pihak Luar

Kebijakan yang telah ditetapkan oleh lembaga pelaksana perlu disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat agar informasi-informasi dapat tersampaikan dengan jelas kepada masyarakat. Kebijakan pengelolaan sampah yang telah ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan dengan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Dari wawancara tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa dampak atau manfaat dari pengelolaan sampah melalui Bank Sampah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, akan tetapi belum sepenuhnya masyarakat dapat memahami hal tersebut dan terkadang masih menyepelkan mengenai permasalahan sampah.

Tabel 2.

Rekap Bank Sampah Tiap Kecamatan Di Kabupaten Tegal Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Bank Sampah	Alamat Bank Sampah (Desa)
1	Margasari	1	Karangdawa
2	Bumijawa	5	Sigedong, Bumijawa, Sokasari (2), Carul
3	Bojong	4	Rembul, Dukuhtengah, Tuwel, Bojong
4	Balapulang	6	Cenggini, Bukateja, Danawarih, Balapulung Kulon (3)
5	Pagerbarang	10	Srengseng (2), Rajegwesi (2), Sidomulyo, Jatiwangi, Randusari, Pagerbarang, Kertaharja (2),
6	Lebaksiu	9	Timbangreja, Lebaksiu Kidul, Lebaksiu Lor, Yamansari, Kesuben, Lebakgowah, Pendawa, Kambangan (2),
7	Jatinegara	1	Dukuhbangsa

8	Kedungbanteng	3	Kedungbanteng, Sumingkir, Kebandingan,
9	Pangkah	9	Depok, Penusupan (2), Bogares Kidul, Pangkah (2), Kendalserut (2), Pecabean,
10	Slawi	6	Pakembaran, Kalisapu (4), Trayeman
11	Adiwerna	4	Harjosari Lor, Tembok Lor, Tembok Luwung, Ujungrusi
12	Talang	-	-
13	Dukuhturi	3	Sidapura, Sutapranan, Karanganyar
14	Tarub	-	-
15	Kramat	5	Dampyak, Ketileng, Kepunduhan, Plumbungan, Padaharja
16	Suradadi	3	Jatibogor, Kertasari, Suradadi
17	Warureja	-	-
18	Dukuhwaru	4	Sarang Lor, Blubuk, Kalisoka, Dukuhwaru
Jumlah		73	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal, 2022

3.3. Variabel Non-hukum Yang Mempengaruhi Implementasi

Hal-hal yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan terdiri dari 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari kebijakan itu sendiri, sedangkan faktor eksternal meliputi hal-hal diluar dari kebijakan. Faktor eksternal (variabel non-hukum) yang mempengaruhi implementasi kebijakan meliputi:

3.3.1. Kondisi Sosial Ekonomi dan Teknologi

Kondisi sosial ekonomi dan teknologi berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah. Masyarakat dengan kondisi sosial terbuka akan lebih dapat menerima terhadap segala perubahan-perubahan dan lebih dapat menerima program-program pengelolaan sampah yang disosialisasikan pemerintah dibandingkan keadaan masyarakat tradisional dan tertutup. Keterbatasan teknologi di Kabupaten Tegal saat ini berpengaruh terhadap keefektifan sistem pengelolaan sampah. Dari total 18 kecamatan di Kabupaten Tegal, hanya 1 Kecamatan yang sudah memiliki mesin tersebut. Hal itu dikarenakan keterbatasan dari anggaran yang dimiliki pemerintah daerah Kabupaten Tegal.

3.3.2. Dukungan Publik

Dukungan publik atau dukungan masyarakat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah sangat diperlukan dan sangat berpengaruh, karena masyarakat merupakan faktor utama dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Pengelolaan sampah dan kelestarian lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah saja, namun hal itu menjadi tanggung jawab semua pihak, baik dari pemerintah daerah, swasta, dan juga masyarakat. Dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah, terdapat beberapa kegiatan untuk menangani sampah yang meliputi:

- a. Pemilahan

Pemilahan sampah dilakukan dimulai dari rumah. Sampah-sampah dipilah berdasarkan jenisnya yaitu sampah organik dan anorganik. Pada pelaksanaannya, belum seluruh masyarakat melakukan kegiatan tersebut.

b. Pengumpulan

Setelah dilakukan pemilahan sampah yang dilakukan oleh masing-masing masyarakat di rumah, selanjutnya sampah anorganik dapat dikumpulkan pada Bank Sampah di desa tersebut. Kemudian untuk sampah lainnya dapat dikumpulkan di tempat sampah untuk nantinya diambil oleh petugas sampah.

c. Pengangkutan

Sampah-sampah yang sebelumnya telah dipilah dan dikumpulkan akan diangkut. Sampah yang berada di Bank Sampah akan diangkut oleh pengepul sampah sebagai pihak ketiga yang sebelumnya sudah menjalin kerja sama. Kemudian sampah lainnya yang tidak dapat dimanfaatkan lagi akan diangkut oleh truk sampah untuk dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah.

d. Pengolahan

Pengolahan sampah yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah sampah yang tidak memiliki nilai dan manfaat menjadi sesuatu yang bermanfaat. Beberapa kegiatan pengolahan sampah meliputi berikut ini:

1. Budidaya maggot
2. Biopori
3. Ecoenzim
4. POC
5. Sedekah minyak jelantah

e. Pemrosesan akhir sampah

Kegiatan pemrosesan akhir sampah yaitu sampah-sampah yang tidak dapat diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat akan dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah yang terletak pada Desa Penujah Kecamatan Kedumbanteng.

3.3.3. Sikap dan Sumber-Sumber Yang Dimiliki Kelompok-Kelompok

Sikap yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam kebijakan pengelolaan sampah di masyarakat sangat berpengaruh. Dukungan dari Dinas Lingkungan Hidup dapat mempengaruhi dampak dari implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Salah satu sikap yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup ialah pendampingan langsung kepada masyarakat di desa-desa pada program Desa Merdeka Sampah.

Sumber daya diperlukan dalam permasalahan sampah. Termasuk sarana prasarana yang ada di Kabupaten Tegal. Sarana dan prasarana merupakan faktor terpenting dalam mempengaruhi implementasi kebijakan. Dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pengelolaan sampah.

Tabel 3.

Sarana dan prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2023

No	Sarana Dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
----	----------------------	--------	------------

1	Arm Roll	4	-
2	Dump Truk	34	7 lelang, 1 rusak
3	Kontainer Sampah	28	9 rusak
4	Roda Tiga Pengangkut Sampah	123	-
5	Becak Sampah	16	-
6	Bank Sampah Induk (unit)	1	-
7	Bank Sampah (unit)	73	-
8	Buldozer	2	1 rusak
9	Ekskavator	1	rusak
10	TPS	111	-
11	TPS 3R	5	-
12	Luas Tanah TPA Penujah (m ²)	16.065	-
13	Mesin Pencacah Sampah Organik	1	-
14	Bank Sampah	73	-

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal, 2022

Berdasarkan data tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup masih kurang memadai dan perlu ditingkatkan kembali untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

3.3.4. Dukungan Dari Pejabat Atasan

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah membutuhkan dukungan dari para pejabat, baik dari pejabat pada Pemerintah Kabupaten Tegal maupun pejabat pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal. Konsistensi dan kedisiplinan diperlukan dalam penerapan program-program untuk pengelolaan sampah.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pejabat atasan sebagai lembaga pelaksana memberikan dukungan penuh kepada masyarakat dan komunitas-komunitas pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Tegal. Kepala Dinas Lingkungan Hidup bersama kepala bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun (PSLB3) melakukan monitoring langsung ke lapangan setidaknya sebulan sekali untuk meninjau langsung masyarakat. Dari dukungan lembaga pelaksana diharapkan program-program yang ada dapat terealisasi secara maksimal dan konsisten dan dapat tercapai tujuan dari kebijakan pengelolaan sampah.

3.4. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Tegal

- a. Koordinasi dan kerja sama yang baik antara Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah kabupaten, kecamatan, dan kelurahan
Koordinasi yang dilakukan antara pemerintah kabupaten, dinas lingkungan hidup, camat, dan lurah sudah cukup baik. Rapat koordinasi-koordinasi sering dilakukan antar pemerintah. Sehingga informasi yang diberikan dari pemerintah kabupaten dapat tersampaikan dan dipahami dengan baik hingga ke pemerintah desa. Hierarki komunikasi antar pemerintah dapat dikatakan cukup baik. Apabila terdapat hambatan dari desa, maka lurah atau kades menyampaikan hal tersebut kepada camat yang kemudian akan

disampaikan kepada bupati melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal.

- b. Petunjuk teknis yang jelas mengenai pelaksanaan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup

Petunjuk teknis yang jelas pada pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Tegal dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah meliputi:

1. Memilah sampah organik dan anorganik yang dilakukan dari rumah
2. Mengolah sampah organik menjadi sesuatu yang dapat dimanfaatkan
3. Mendaur ulang sampah anorganik menjadi suatu barang yang dapat berguna dan bernilai
4. Pelaksanaan kegiatan Bank Sampah pada desa-desa
5. Pengangkutan sisa sampah ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah

3.5. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Tegal

- a. Kesadaran masyarakat yang masih rendah

Masyarakat merupakan faktor paling penting dalam implementasi suatu kebijakan. Berhasil atau tidaknya suatu kebijakan dipengaruhi oleh sikap dari masyarakat itu sendiri. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, kesadaran masyarakat di Kabupaten Tegal mengenai permasalahan sampah masih dianggap rendah. Apalagi kesadaran mengenai pengelolaan sampah dan bahkan beberapa masyarakat masih belum mengetahui dan memahami program-program pengelolaan sampah. Masih banyak masyarakat yang menganggap sampah merupakan barang yang tidak berguna dan tidak bermanfaat sehingga di buang begitu saja. Bahkan hingga saat ini masih ditemukan beberapa masyarakat yang membuang sampah sembarangan di lingkungan sekitar, bukan di tempat pembuangan sampah. Jika kesadaran masyarakat masih rendah hingga beberapa tahun ke depan, maka tujuan dari pengelolaan sampah tidak dapat tercapai dengan maksimal.

- b. Keterbatasan anggaran

Anggaran merupakan salah satu hal terpenting dalam implementasi suatu kebijakan pengelolaan sampah. Anggaran yang diberikan oleh pemerintah untuk menangani permasalahan sampah di Kabupaten Tegal masih terbatas dan kurang tercukupi untuk menunjang program-program pengelolaan sampah di Kabupaten Tegal. Keterbatasan anggaran tersebut juga berpengaruh pada sarana dan prasarana yang kurang memadai dan masih ada beberapa sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan dan belum diperbaiki hingga sekarang.

- c. Keterbatasan jumlah tenaga kerja lapangan

Jumlah tenaga kerja lapangan saat ini tidak sebanding dengan luas wilayah Kabupaten Tegal dan jumlah masyarakat di Kabupaten Tegal. Luas wilayah Kabupaten Tegal sebesar 878,79 km² tidak sebanding dengan total tenaga kerja lapangan 222 orang. Keterbatasan tenaga kerja lapangan berpengaruh terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Tegal. Sehingga dalam pelaksanaannya masih belum optimal.

- d. Sarana dan prasarana yang masih kurang memadai

Sarana dan prasarana merupakan faktor terpenting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai, pelaksanaan suatu kebijakan akan terhambat. Sarana dan prasarana di Kabupaten Tegal masih kurang memadai. Beberapa sarana dan prasarana seperti alat berat berupa ekskavator dan buldozer yang mengalami kerusakan menghambat pengangkutan sampah di Tempat Pembuangan Akhir Sampah Penujah. Sehingga memerlukan waktu lebih dalam pengangkutan sampah dari truk sampah ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah. Beberapa dump truk dan kontainer sampah juga mengalami kerusakan, sehingga menghambat pengangkutan sampah dari suatu daerah ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah. Keterbatasan mesin pencacah sampah yang saat ini hanya memiliki 1 mesin pencacah sampah. Sehingga pengelolaan sampah yang terjadi saat ini masih kurang optimal.

3.6. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengoptimalkan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Tegal

1. Melakukan Sosialisasi Kepada Masyarakat

Peningkatan kesadaran masyarakat merupakan hal penting yang dapat dilakukan dalam upaya mengoptimalkan implementasi suatu kebijakan. Pemerintah Kabupaten Tegal dengan Dinas Lingkungan Hidup melakukan sosialisasi dengan melalui PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) dan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang ada di desa-desa untuk menumbuhkan kepedulian masyarakat mengenai pengelolaan sampah.

2. Memaksimalkan Pelaksanaan Program Desa Merdeka Sampah

Program Desa Merdeka Sampah yang telah ditetapkan pada tahun 2022 melalui Peraturan Bupati Tegal Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Program Desa Merdeka Sampah. Program Desa Merdeka Sampah diharapkan dapat melatih kemandirian masing-masing desa dalam mengatasi permasalahan sampah di lingkungan sekitar. Pemerintah memberikan anggaran kepada desa yang telah memenuhi syarat dalam pelaksanaan program Desa Merdeka Sampah sebesar Rp 100.000.000.

Pada pelaksanaan Program Desa Merdeka Sampah di Kabupaten Tegal sudah dibangun 5 TPS 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang berada di Desa Pesarean, Desa Kalibakung, Desa Kalisoka, Desa Kaliwungu, dan Desa Lebakgowah. TPS 3R tersebut rencananya akan diresmikan pada tahun 2023 ini.

3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi

Monitoring merupakan proses pengumpulan informasi yang selanjutnya dianalisis secara berkelanjutan mengenai pelaksanaan suatu program atau kebijakan. Sedangkan evaluasi merupakan penilaian terhadap suatu program secara relevansi, efisiensi, dan dampak dari program tersebut apakah penerapannya sudah sesuai atau masih belum sesuai.

Pada pelaksanaan program-program pengelolaan sampah dibutuhkan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan program tersebut. Tujuannya yaitu untuk mengetahui efisiensi dan keefektifan program pengelolaan sampah, dan apabila ditemukan suatu hambatan atau rintangan dapat menemukan segera solusi yang tepat sesuai dengan hambatan tersebut.

4. Membuat Program Blantik (Belanja Tanpa Kantong Plastik)

Program Blantik atau belanja tanpa kantong plastik merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mengurangi penggunaan plastik saat berbelanja dengan tujuan mengurangi sampah plastik yang dihasilkan sasaran dari program ini yaitu semua pelaku usaha yang ada di Kabupaten Tegal.

Program Blantik sudah mulai disosialisasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal pada akhir tahun 2022 dengan mengundang beberapa pejabat di Sekretariat Daerah kabupaten Tegal, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, Lurah, dan komunitas-komunitas masyarakat. Program Blantik sudah dicoba untuk dilaksanakan pada beberapa swalayan lokal yang ada di Kabupaten Tegal

5. Mengajukan Proposal Anggaran Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Provinsi

Hambatan mengenai keterbatasan anggaran dan keterbatasan jumlah tenaga kerja lapangan saling berkaitan. Karena keterbatasan anggaran, maka Dinas Lingkungan Hidup tidak dapat memenuhi jumlah tenaga kerja non PNS yang dibutuhkan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal sudah mengajukan permintaan anggaran kepada pemerintah daerah. Hal tersebut belum dapat terealisasi dikarenakan masih ada program-program prioritas daerah lain yang harus dimaksimalkan.

3.7. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan implementasi kebijakan pengelolaan sampah merupakan suatu kegiatan yang penting untuk menjaga lingkungan. Penulis menemukan temuan penting yakni tidak semua masyarakat sudah memahami mengenai kebijakan pengelolaan sampah dan memahami permasalahan sampah yang terjadi di lingkungan sekitar. Untuk penerapan kebijakan pengelolaan sampah secara maksimal, Pemerintah Kabupaten Tegal dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal harus bekerja sama dengan baik bersama masyarakat.

Sama halnya dengan temuan Yulianto Mokodompis dkk bahwa kebijakan pengelolaan sampah terhambat karena kesadaran masyarakat yang masih rendah (Yulianto Mokodompis dkk, 2019). Berbeda halnya dengan temuan Anton Soeharsono dkk bahwa kebijakan pengelolaan sampah masih terhambat dikarenakan belum adanya Peraturan Walikota sebagai peraturan teknis pelaksanaan.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Tegal belum berjalan dengan optimal. Hal tersebut dapat dilihat pada dimensi variabel non-hukum yang mempengaruhi implementasi pada sub dimensi dukungan publik. Masyarakat belum sepenuhnya mendukung kebijakan pengelolaan sampah dilihat dari kurangnya kesadaran masyarakat terhadap permasalahan sampah. Hambatan lainnya yaitu sarana dan prasarana yang masih kurang memadai untuk pengelolaan sampah.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu peneliti hanya dapat melakukan penelitian pada beberapa desa atau kelurahan saja dikarenakan luasnya wilayah Kabupaten Tegal serta keterbatasan waktu penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Tegal untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal, beserta masyarakat Kabupaten Tegal yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Hastuti, B., Anwar, F., Darmi, T., Studi, P., & Publik, A. (t.thn.). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN*. Diambil kembali dari <http://jiapi.ut.ac.id/index.php/jiapi/index>
- Mokodompis, Y., Kaunang, M., & Kasenda, V. (2019). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA MANADO*. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2337-5736.
- Novia Kencana. (2016). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU*. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 2502-2032.
- Yudianto T, S. P. (2021). *Implementasi Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Blora*. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 21-26.
- Yulistia, G., Suryaningsih, M., Rostyaningsih, D., Publik, J., Profesor, J., Soedarto, H., . . . Semarang, T. (t.thn.). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH KOTA SEMARANG MENURUT PERDA NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH*.

